****

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537

Laman : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), surel : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25171**

Nomor : W3-A/ /KP.04.1/12/2022 Desember 2022

Lampiran : 1 (satu) lampiran

Perihal : Kenaikan Pangkat Pegawai

Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Periode 1 April 2023

Yth. Ketua Pengadilan Agama

se Sumatera Barat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2911/SEK/KP.04.1/12/2022 tanggal 16 Desember 2022 perihal Usul Kenaikan Pangkat Tahun 2023 dan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 5150/DjA.2/KP.04.1/12/2022 21 Desember 2022 perihal Kenaikan Pangkat Tenaga Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan Agama Periode 1 April 2023, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Segera menyampaikan daftar nama hakim dan aparatur yang telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat (reguler dan pilihan) periode April 2023 melalui email [kepegawaian1@pta-padang.go.id](mailto:kepegawaian1@pta-padang.go.id) paling lambat tanggal 28 Desember 2022 serta menginput usul melalui aplikasi SIUPIK paling lambat tanggal 29 Desember 2022;
2. Melakukan peremajaan data seluruh Hakim dan aparatur dengan memprioritaskan pegawai yang akan diusulkan naik pangkat periode 1 April 2023 (pada aplikasi SIKEP dan aplikasi SIASN)
3. Kelengkapan berkas persyaratan kenaikan pangkat yang harus diperhatikan meliputi:
4. Asli/salinan sah SK kenaikan Pangkat terakhir atau SK Penyesuaian Masa Kerja (bila ada);
5. Asli/salinan sah SK Mutasi Jabatan terakhir;
6. Asli/salinan sah Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) mutasi jabatan terakhir;
7. Asli/salinan sah SK CPNS dan PNS bagi yang pertama kali naik pangkat;
8. SKP 2 (dua) tahun terakhir dengan mengacu pada peraturan yang berlaku yaitu :
9. SKP Tahun 2021;
10. Setiap unsurnya bernilai minimal baik;
11. bulan Januari s/d Juni 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011;
12. Bulan Juli s/d Desember 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019;
13. Diunggah pada aplikasi SIKEP dan SAPK BKN;
14. SKP tahun 2022;
15. Berpredikat minimal baik;
16. Setiap pegawai diwajibkan mengisi data secara mandiri dengan menggunakan masing-masing akun pegawai melalui web e-kinerja pada <https://kinerja.bkn.go.id> (user dan password sama dengan akun MySAPK);
17. Format SKP tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
18. Asli/salinan sah Izin Pencantuman Gelar Pendidikan dari Badan Kepegawaian Negara (bila ada);
19. Kenaikan Pangkat bagi Hakim dan aparatur yang memiliki ijazah Strata Dua (S2) dapat diusulkan dalam pangkat minimal Penata Muda Golongan Ruang III/a, dan diproses apabila sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir, yang dihitung sejak tanggal pelantikan sebelum tanggal 1 April 2023, dengan berkas persyaratan tambahan selain berkas persyaratan pada angka 2 meliputi:
20. Asli/salinan sah Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai (minimal legalisir Direktur Program);
21. Surat Keterangan Akreditasi BAN-PT;
22. Surat Keterangan Persetujuan Menyelenggarakan Perkuliahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bagi kampus/program studi dengan Akreditasi BAN-PT bernilai C (baik);
23. Asli surat keterangan kuliah yang ditandatangani Ketua Pengadilan, jika mulai kuliah sebelum menjadi CPNS/PNS;
24. Asli/salinan sah Surat Izin Belajar, jika mulai kuliah setelah menjadi CPNS/PNS;
25. Asli Surat Keterangan Kronologis Pendidikan;
26. Usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, wajib melampirkan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (STLUKPI) dan uraian tugas;

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam

**Wakil Ketua**

**Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I.**

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang (sebagai laporan).